

ABSTRAK

Indonesia merupakan suatu wilayah yang sangat luas serta memiliki banyak potensi yang dapat menciptakan tumbuhnya perekonomian. Atas hal itu, Indonesia membutuhkan penanaman modal baik dari dalam maupun luar negeri. Penanaman modal di suatu wilayah negara merupakan hal yang sangat penting karena dapat menciptakan dampak ganda dan pertumbuhan ekonomi yang kuat bagi masyarakat di sekitarnya. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah demi terwujudnya penanaman modal. Upaya tersebut yakni kemudahan mekanisme pelayanan untuk penanaman modal serta dibentuknya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang hingga sekarang berjumlah 20 di Indonesia.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui mekanisme penanaman modal secara umum di Indonesia serta perbedaannya dengan mekanisme penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia atau khususnya KEK Gresik.

Metode yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan analisis deskriptif, menggunakan sumber data bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini juga mengumpulkan data melalui wawancara dengan narasumber serta mengolah data yang didapatkan dengan teknik yuridis kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan yang terdapat dalam mekanisme penanaman modal di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Perbedaan dari sistem sebelumnya dapat memudahkan para pelaku usaha mengurus perizinan penanaman modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perizinan di KEK lebih mudah dan Pelaku Usaha di KEK mendapatkan fasilitas fiskal dan non-Fiskal. KEK Gresik telah melakukan perintah yang diamanatkan oleh Undang-Undang sesuai visi-misinya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempermudah sistem penanaman modal bagi Pelaku Usaha yang melakukan penanaman modal.

Kata Kunci : *Penanaman Modal, Mekanisme, Perizinan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*

ABSTRACT

Indonesia is a very large area and has a lot of potential that can create economic growth. For this reason, Indonesia needs capital investment both from within and outside the country. Investment in a country's territory is very important because it can create a double impact and strong economic growth for the surrounding community. Various efforts are made by the government for the realization of investment. These efforts are the ease of service mechanisms for investment and the establishment of Special Economic Zones (SEZs) which until now number 20 in Indonesia.

This research aims to find out the general investment mechanism in Indonesia and how it differs from the investment mechanism in Special Economic Zones (SEZs) in Indonesia or especially Gresik SEZ.

The method used by researchers in this research is normative juridical using descriptive analysis, using data sources of primary, secondary, and tertiary legal materials. This research also collects data through interviews with sources and processes the data obtained with qualitative juridical techniques.

This research shows that there are differences in the investment mechanism in Indonesia after the enactment of the Job Creation Law. The difference from the previous system can make it easier for business actors to process investment licenses. This research results show that licensing in SEZs is easier and business actors in SEZs get fiscal and non-fiscal facilities. Gresik SEZ has carried out the orders mandated by the Law in accordance with its vision to increase economic growth and facilitate the investment system for business actors who make investments.

Keywords: *Investment, Mechanism, Licensing, Special Economic Zone (KEK)*